

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem Pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. good goverment diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mempercepat kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut, pemerintah otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), terlebih lagi dalam situasi globalisasi seperti masa sekarang ini, untuk itu pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini menyelenggarakan E-Procurement atau pelelangan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebagai bentuk komitmen Pemerintah Jawa Timur terhadap kebijakan implementasi Peraturan yang diberlakukan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Timur.

Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme dalam tata proses implementasi kebijakan publik di Provinsi Jawa Timur. selain itu diharapkan dapat menjamin transparansi pada saat implementasi E-Procurement atau pelelangan berlangsung tidak terjadi monopoli, intimidasi, dan premanisme dalam proses pelelangan diharapkan dapat diminimalisir. Pelaksanaan E-Procurement, beberapa aspek perlu untuk diperhatikan dalam hal. pelaporan Pengadaan Barang/Jasa seperti pada summary report dalam pengadaan barang dan jasa apakah kelayakan dokumen laporan keuangan dalam pengadaan barang dan jasa secara khusus dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah dalam hal ini terkait dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD), perusahaan dan masyarakat sebagai salah satu kelompok sasaran kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penulis melihat apa yang sudah tertera pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ), Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang didalamnya terdapat tata cara Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik.

E-procurement merupakan Sebuah instrumen dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait memperadakan barang maupun jasa dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi serta transaksi secara secara daring (online) sejalan dengan ketentuan peraturan undang-undang. Perkembangan teknologi dan informasi yang sudah sangat maju memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

Upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintah yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya dengan memiliki dan menerapkan standart prosedur kerja yaitu Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa. Standar operasional adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknik. Sistem Pengendalian yang digunakan adalah strategi peningkatan pelayanan dengan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa informasi teknologi (IT) secara elektronik menggunakan aplikasi yaitu Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (APEL BAJA) di pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tujuan Studi Lapangan

Berkenaan dengan latar belakang yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi lapang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kelayakan dokumen laporan keuangan dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Rencana Executive sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.

Manfaat Studi Lapangan

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pengetahuan dan pembelajaran dalam pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur
2. Memperoleh fakta langsung dari objek yang berada pada tempat yang asli. Melalui studi lapangan, dan dapat mengetahui apakah permasalahan yang telah dirumuskan memang benar sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Ruang Lingkup Studi Lapangan

Agar penelitian tidak melebar dan mengarah pada hasil yang jelas, maka peneliti hanya memfokuskan pada mekanisme pengadaan Barang/Jasa, yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan

penelitian. Didalam pengumpulan data ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Studi Lapang

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan riset data yang diperoleh dengan cara :

a. Dokumentasi

Mengamati, melihat dokumen-dokumen, catatan-catatan yang ada dalam perusahaan, baik berupa tulisan, gambar, maupun keterangan lainnya.

b. Observasi

Diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaporan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

